

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan iklim tropis yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir secara konsisten menjadi bencana dengan jumlah kejadian tertinggi dibandingkan jenis bencana lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Banjir terjadi akibat berbagai faktor, baik faktor alam maupun aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, meluapnya sungai, berkurangnya daerah resapan air, sistem drainase yang kurang memadai, serta perubahan tata guna lahan menjadi penyebab utama terjadinya banjir di berbagai wilayah. Selain itu, perubahan iklim turut meningkatkan intensitas hujan ekstrem sehingga memperbesar risiko terjadinya banjir, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir.

Salah satu daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir adalah Kota Semarang. Sebagai kota yang berada di kawasan pesisir utara Pulau Jawa, Kota Semarang sering mengalami banjir akibat curah hujan maupun banjir rob. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah **Kecamatan Genuk**, yang secara geografis berada di dataran rendah dan kawasan pesisir sehingga banjir menjadi peristiwa yang terjadi secara berulang. Kondisi tersebut menjadikan banjir sebagai permasalahan yang terus dihadapi masyarakat dan memerlukan upaya penanganan yang berkelanjutan dari pemerintah.

Tabel 1. 1 Kelurahan Semarang Yang Terdampak Banjir Tahun 2024 dan 2025

Kecamatan	Jumlah Kelurahan Tahun 2024	Jumlah Kelurahan Tahun 2025
Mijen	-	-
Gunungpati	-	-
Banyumanik	1	-
Gajah Mungkur	-	1
Semarang Selatan	3	-
Candisari	-	-
Tembalang	6	4
Pedurungan	4	3
Genuk	10	9
Gayamsari	4	5
Semarang Timur	8	3
Semarang Utara	4	5
Semarang Tengah	-	4
Semarang Barat	1	2

Kecamatan	Jumlah Kelurahan Tahun 2024	Jumlah Kelurahan Tahun 2025
Tugu	2	6
Ngaliyan	1	2

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Kecamatan Genuk secara konsisten menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kelurahan yang mengalami bencana banjir tertinggi di Kota Semarang. Pada publikasi tahun 2024 tercatat sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Genuk mengalami bencana banjir, sedangkan pada publikasi tahun 2025 tercatat 9 kelurahan mengalami bencana banjir. Meskipun jumlah kelurahan terdampak mengalami sedikit perubahan, data tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi permasalahan yang terjadi secara berulang di Kecamatan Genuk sehingga wilayah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan Kecamatan Genuk sebagai lokasi penelitian (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2024)

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak melalui berbagai bentuk pelayanan dan bantuan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penyelenggaraan program bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat maupun setelah bencana terjadi. Keberadaan program bantuan sosial menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terdampak serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Melihat besarnya dampak banjir terhadap kehidupan masyarakat, pelaksanaan program bantuan sosial menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Program tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan sosial perlu mendapat perhatian sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Bantuan yang diberikan dapat berupa bahan pangan, makanan siap saji, air bersih, pakaian, selimut, perlengkapan tidur, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Penyaluran bantuan tersebut melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta unsur masyarakat agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan secara cepat dan tepat.

Pelaksanaan bantuan sosial di Kota Semarang juga didukung oleh regulasi daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya. Salah satunya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, termasuk akibat bencana (Pemerintah Kota Semarang, 2022). Selain itu, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang juga didukung oleh prosedur operasional yang melibatkan koordinasi

antarperangkat daerah, mulai dari proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima bantuan, hingga proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Keberadaan program bantuan sosial menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir. Namun, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan kepada masyarakat, tetapi juga dari bagaimana pelaksanaan program tersebut mampu memenuhi tujuan kebijakan, menjangkau masyarakat yang berhak menerima bantuan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan program bantuan sosial perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program bantuan sosial tidak hanya bertujuan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi darurat, mengurangi beban yang ditimbulkan akibat bencana, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial akibat bencana. Dengan demikian, pelaksanaan program bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Dalam penyelenggaraannya, pelaksanaan program bantuan sosial diharapkan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu

menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, koordinasi antarlembaga, ketepatan pendataan penerima bantuan, serta kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial. Apabila seluruh aspek tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka tujuan program bantuan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak bencana dapat tercapai secara optimal.

Namun demikian, keberhasilan suatu program tidak dapat hanya dinilai berdasarkan tersalurkannya bantuan kepada masyarakat. Pelaksanaan program juga perlu diketahui apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial agar dapat diketahui sejauh mana tujuan program telah tercapai serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap penyelenggaraan program bantuan sosial pada masa yang akan datang.

Evaluasi menjadi bagian penting dalam proses kebijakan publik karena memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai penilaian terhadap hasil suatu program, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan program bantuan sosial agar lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian mengenai pelaksanaan program bantuan sosial telah banyak dilakukan, namun penelitian yang secara khusus mengevaluasi program bantuan sosial pada wilayah dengan karakteristik banjir yang terjadi secara berulang masih terbatas. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program di tingkat pemerintah daerah juga masih memerlukan kajian lebih lanjut. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis dalam bidang kebijakan publik, manajemen bencana, dan program bantuan sosial, serta menguji relevansi teori-teori kebijakan sosial dan manajemen penanggulangan bencana dalam konteks lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, khususnya instansi yang terlibat dalam pengelolaan bantuan sosial dan penanggulangan bencana, sebagai bahan evaluasi dan bisa untuk strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif kedepannya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelum ini diperlukan sebagai referensi yang berguna untuk mendukung literatur penelitian ini. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi dan bahan acuan. Penulis menyiapkan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, yaitu “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai” ditulis oleh Khusnul Khothimah dan Diana Hertati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan kepada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Evaluasi program mempersoalkan apa yang

sesungguhnya telah terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau program dengan apa yang terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Atau bisa dikatakan bahwa evaluasi akan mempersoalkan dampak nyata dari sebuah proses akhir kebijakan atau seberapa jauh kebijakan tersebut mencapai hasil yang diharapkan sesuai tujuan, dan untuk menilai keberhasilan suatu program juga diperlukan pengembangan beberapa indikator atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi. Peneliti melakukan tinjauan ke lapangan tempat BST ini berlangsung di salah satu kecamatan di Surabaya yaitu Kecamatan Tambaksari (Khothimah & Hertati, 2021).

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu “Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kabupaten Gianyar” ditulis oleh Sang Ayu Made Regitha Megaartha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan proses penelusuran untuk memahami dan mendapatkan informasi secara mendalam melalui metode wawancara. Memahami fenomena dengan berbagai metode alamiah merupakan titik berat dari metode penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Secara garis besar, bantuan yang diberikan oleh pemerintah terdiri atas bantuan sosial tunai dan bantuan sosial non tunai melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Jika ditelisik lebih mendalam, bantuan sosial tunai yang diberikan oleh pemerintah sudah memenuhi kriteria dari sisi efektivitas, efisiensi, dan ketepatan penyaluran. Namun, bantuan sosial tunai masih mengalami kendala dari sisi kecukupan, pemerataan, dan responsibilitas. Jika ditelaah dari sisi kecukupan, program bantuan sosial tunai memberikan manfaat yang terbatas karena bantuan yang diterima tidak

cukup sampai dengan waktu penyaluran yang berikutnya. Dari sisi pemerataan, distribusi bantuan sosial tunai masih belum merata karena terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Dari sisi responsibilitas, penerima bantuan merasa kurang puas karena subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan pokok saat ini (Megaartha, (2022)).

Penelitian lain yang berkaitan dengan tulisan ini “Evaluasi Program Bantuan Sosial Lansia Non Potensial di Kota Madiun dengan Model *Context Input Process Product* (CIPP)” ditulis oleh Melasisca Yunanda Lisnavernita, Tora Akadira, Nita Nurliawati, dan Antonio Vivaldi. Program bantuan sosial lansia non potensial merupakan program unggulan Kota Madiun untuk penanganan lansia yang tidak berdaya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tetapi belum pernah dievaluasi terhadap efektivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil kesesuaian antara capaian program dengan rancangan awal serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat program. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan menggunakan model *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP). Hasil evaluasi pada aspek *Context* menunjukkan bahwa tujuan program dan prioritas sasaran sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat. Faktor penghambat antara lain jumlah SDM pelaksana yang terbatas, belum adanya sinergitas berbagai pihak, dan belum tersedia sistem terintegrasi. Kesimpulan penelitian ini adalah masih diperlukan untuk penanganan lansia non potensial. Namun, perbaikan program perlu segera dilaksanakan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih maksimal. (Lisnavernita et al., 2024).

Penelitian yang masih relevan dengan penelitian penulis adalah “Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan” ditulis oleh Hafadh Furqan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program distribusi bantuan logistik untuk korban banjir di Kecamatan Sawang telah memenuhi dimensi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Program ini memiliki sasaran yang jelas, dasar hukum kuat, struktur organisasi mendukung, serta prosedur operasional memadai. Pelaksanaannya menunjukkan koordinasi baik dengan berbagai pihak serta penyaluran dana tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar hubungan kerja dengan pemerintah dan instansi lain tetap terjaga dengan baik, jumlah pegawai yang memiliki keahlian khusus ditingkatkan, pelatihan dilaksanakan secara rutin, sarana dan prasarana ditambah serta ditingkatkan kondisinya, dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta kepedulian sosial terus dilakukan (Furqan, 2024).

Selanjutnya, penelitian terakhir yang penulis gunakan untuk sumber referensi yang relevan adalah “Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia” ditulis oleh Revalia Putri dan Hendra

Riofita. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai jurnal dan skripsi terpercaya yang relevan, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Program bantuan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Program-program tersebut membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Keberhasilan ini didukung oleh data dari BPS dan evaluasi kebijakan oleh Bappenas, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan dan rasio ketimpangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, efektivitas program bantuan sosial ini belum maksimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya (Putri & Riofita, 2025).

1.6 Landasan Teori

1.6.1. Teori Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2017) kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu yang berdampak luas bagi masyarakat. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya sebatas dokumen atau aturan formal, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata yang dirancang untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks bencana banjir, kebijakan publik muncul sebagai respons pemerintah untuk mengurangi dampak bencana terhadap warga dan memberikan bantuan sosial

sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. Kebijakan publik, menurut Dunn, bersifat prosedural dan berkesinambungan, yang mencakup perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Evaluasi menjadi bagian integral dari proses ini karena tanpa evaluasi, pemerintah tidak dapat mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan sudah efektif, efisien, tepat sasaran, responsif, dan adil dalam pemerataan bantuan. Dalam penelitian ini, teori William N. Dunn (2017) dapat dioperasionalkan melalui beberapa aspek.

1.6.1.1 Evaluasi Kebijakan

Menurut William N. Dunn (2017), evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk dengan menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan, terdapat beberapa kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan. Kriteria ini dikemukakan oleh William N. Dunn (2017) dan banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik di Indonesia.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi

efektivitas berfokus pada pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dan apakah kebijakan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Efektivitas biasanya diukur berdasarkan *output* (hasil langsung) maupun *outcome* (dampak jangka panjang) yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Evaluasi efisiensi bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dijalankan dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat. Efisiensi sering diukur dengan rasio biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) atau perbandingan antara input dan *output* kebijakan.

3. Kecukupan

Kecukupan mengukur sejauh mana hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan sudah cukup untuk mengatasi masalah yang menjadi alasan kebijakan tersebut dibuat. Kriteria ini menilai apakah kebijakan telah memenuhi standar atau ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. Jika kebijakan belum cukup memecahkan masalah, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan.

4. Pemerataan

Pemerataan menilai apakah manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang

dirugikan atau diabaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerataan juga mencakup aspek keadilan sosial dan distribusi sumber daya secara merata.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah ukuran sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan preferensi masyarakat. Kebijakan yang responsif akan lebih mudah diterima dan didukung oleh masyarakat karena dianggap relevan dengan kebutuhan mereka. Evaluasi responsivitas melihat apakah kebijakan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan menilai apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan masalah yang ingin diatasi dan tepat sasaran. Kriteria ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil relevan dengan tujuan yang ingin dicapai serta mampu memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada. Ketepatan juga mencakup kesesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan enam indikator tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai alat analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program telah berjalan sesuai tujuan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaannya.

1.6.2 Teori Bencana Alam

Menurut Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis (2012), bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat sehingga menimbulkan berbagai dampak, seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, dampak bencana tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya ancaman yang terjadi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan upaya penanganan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam konteks bencana banjir di Kecamatan Genuk, banjir menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat serta meningkatnya kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi. Kondisi tersebut menuntut adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah melalui berbagai bentuk penanganan, salah satunya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Bantuan sosial menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi dampak bencana sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat maupun pascabencana.

Wisner, Blaikie, Cannon, dan Davis (2012) menjelaskan bahwa upaya penanganan bencana tidak hanya dilakukan sebelum bencana melalui pengurangan risiko, tetapi juga setelah bencana melalui berbagai bentuk intervensi untuk mengurangi kerentanan masyarakat. Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah pelaksanaan program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori bencana digunakan untuk menjelaskan bahwa

bantuan sosial merupakan bagian dari upaya penanganan pascabencana dalam mengurangi kerentanan masyarakat akibat banjir. Selanjutnya, pelaksanaan program bantuan sosial tersebut dievaluasi menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.7 Operasional Konsep

Menurut Sugiyono (2019: 221), definisi operasional merupakan unsur penelitian yang menjelaskan cara mengukur suatu variabel atau dengan kata lain semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel tersebut, sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat dioperasionalkan menjadi indikator yang konkret yang dapat diamati dan diukur secara empiris dalam penelitian. Definisi ini menekankan pentingnya operasionalisasi untuk menghindari ambiguitas serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat direproduksi.

Dalam penelitian ini, evaluasi program bantuan sosial dianalisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2017) yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun indikator pada masing-masing kriteria dioperasionalkan berdasarkan standar pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun (2008) tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

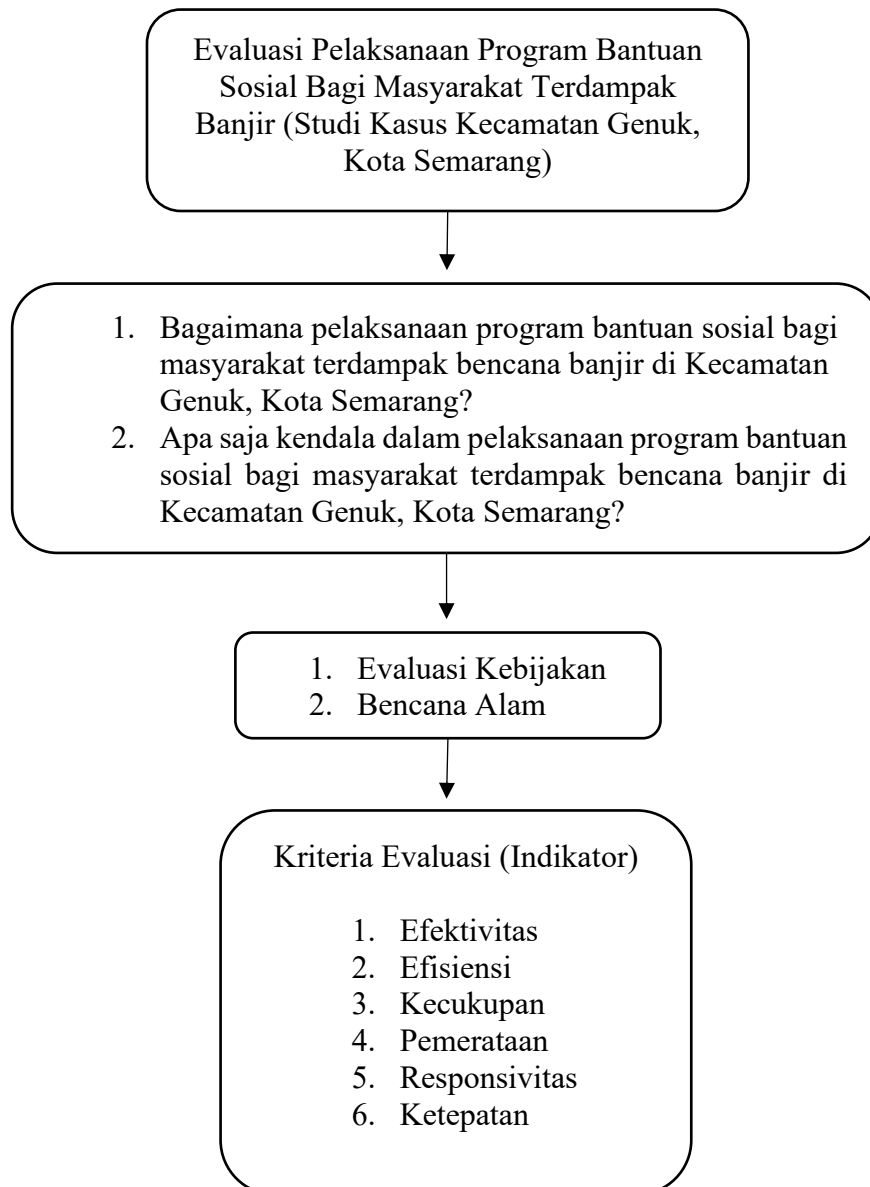
Tabel 1. 2 Operasional Konsep

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Bantuan sosial memenuhi kebutuhan dasar meliputi penampungan, pangan, sandang, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
	Meringankan Beban Sosial Ekonomi	Sejauh mana bantuan sosial dapat membantu masyarakat bertahan selama aktivitas sosial dan ekonomi terganggu akibat banjir.
Efisiensi	Kecepatan Penyaluran Bantuan	Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
	Kemudahan Proses Penyaluran Bantuan	Proses pendataan, asesmen, koordinasi dan distribusi bantuan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.
Kecukupan	Kesesuaian Jumlah Bantuan	Mekanisme pemberian bantuan dalam menentukan jumlah bantuan yang harus di distribusikan.
	Kesesuaian Jenis Bantuan	Mengidentifikasi jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan.

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pemerataan	Distribusi Bantuan	Distribusi berada sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
	Keadilan Penerima Bantuan	Seluruh masyarakat terdampak berhak menerima bantuan.
Responsivitas	Respons Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat	Kemampuan pemerintah dalam mengenali dan merespons kebutuhan masyarakat terdampak banjir berdasarkan hasil asesmen kebutuhan di lapang.
	Penanganan Keluhan Masyarakat	Tindak lanjut pemerintah terhadap keluhan dan laporan yang disampaikan masyarakat.
Ketepatan	Akurasi Data Penerima Bantuan	Pendataan penerima bantuan sudah sesuai dengan yang ada di lapangan.
	Ketepatan Sasaran Bantuan	Bantuan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam melalui pandangan, pengalaman, serta makna yang diberikan oleh para informan yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, melainkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap proses pelaksanaan, efektivitas, serta kendala program bantuan sosial dalam menanggulangi dampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti berupaya mengevaluasi implementasi program bantuan sosial dengan cara menggali informasi secara langsung dari masyarakat penerima bantuan, aparat kelurahan, petugas Dinas Sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan mendalam mengenai sejauh mana program bantuan sosial telah berjalan sesuai dengan tujuan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di lapangan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Genuk dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak banjir cukup parah pada awal tahun 2024 serta menjadi fokus pelaksanaan program bantuan sosial dari pemerintah kota dan pemerintah pusat. Lokasi ini juga dinilai relevan untuk

mengevaluasi sejauh mana program bantuan sosial mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti berfokus pada korban bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Penelitian ini berfokus pada pengalaman, pandangan, dan persepsi para informan terhadap proses implementasi program bantuan sosial, mulai dari tahap penyaluran hingga dampaknya terhadap pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.

Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini meliputi:

1. Masyarakat penerima bantuan sosial, yaitu warga Kecamatan Genuk yang terdampak banjir dan menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mereka menjadi sumber informasi utama untuk memahami sejauh mana bantuan yang diterima telah memenuhi kebutuhan dasar.
2. Aparat pemerintah daerah, seperti perangkat kelurahan, petugas Dinas Sosial, dan perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota

Semarang yang berperan dalam proses pendataan, distribusi, serta evaluasi program bantuan sosial.

3. Relawan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan distribusi dan pendampingan penerima bantuan selama masa tanggap darurat dan pascabencana.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan disesuaikan dengan prinsip kejenuhan data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan lagi informasi baru dari informan tambahan. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial, hambatan yang dihadapi di lapangan, serta dampak program terhadap masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan berbentuk uraian, penjelasan, pengalaman, serta pandangan para informan terkait pelaksanaan program bantuan sosial. Fokus penelitian ini tidak hanya pada jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, apakah tepat sasaran, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Genuk.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi intensif dengan subjek penelitian, yang dirancang untuk menggali esensi fenomena bantuan sosial dalam konteks bencana banjir di Kecamatan Genuk. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang bersifat semi terstruktur. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan di lokasi terdampak untuk mengamati secara langsung proses verifikasi data penerima melalui aplikasi Cek Bansos dan distribusi di posko BPBD Genuk, menghasilkan catatan lapangan yang kaya akan informasi faktual seperti kondisi jalan becek dan antrean panjang warga.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan BPBD Kota Semarang tentang banjir 2024, publikasi BPS "Kecamatan Genuk Dalam Angka 2024", dan situs Kementerian Sosial Republik Indonesia mengenai penyaluran bantuan logistik bagi korban banjir di Kota Semarang. Sumber lain mencakup jurnal akademik yang membahas evaluasi bantuan sosial dengan pendekatan kualitatif menggunakan model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) atau teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, serta data dari Dinas Sosial Kota Semarang yang diperoleh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Data sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi dan memperkuat pemahaman mengenai kondisi banjir di Kecamatan Genuk, termasuk informasi mengenai wilayah terdampak, karakteristik masyarakat, pelaksanaan

program bantuan sosial, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan, yaitu dengan menekankan pada upaya memperoleh data yang mendalam, nyata, dan kontekstual mengenai pelaksanaan program bantuan sosial dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik sebagai pelaksana program maupun sebagai penerima manfaat.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para informan yang telah dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Informan yang diwawancarai meliputi masyarakat penerima bantuan sosial, aparat pemerintah kelurahan, petugas Dinas Sosial Kota Semarang, serta pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan program. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan pandangan, pengalaman, dan pendapatnya secara luas dan mendalam. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali pengalaman, persepsi, serta berbagai hambatan yang

dihadapi informan dalam proses pelaksanaan program bantuan sosial di wilayah terdampak banjir.

2. Observasi Lapangan

Tahap kedua penelitian dilakukan melalui observasi lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat dan situasi di wilayah penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati proses distribusi bantuan sosial, kondisi lingkungan pascabencana, serta interaksi antara pelaksana program dan penerima bantuan. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat memahami secara kontekstual bagaimana kebijakan dan program bantuan sosial diterapkan di lapangan serta sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Observasi ini juga membantu peneliti untuk membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

3. Dokumentasi

Tahap ketiga adalah studi dokumentasi sebagai pelengkap data lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial, seperti laporan dari Dinas Sosial Kota Semarang, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peraturan dan pedoman pemerintah mengenai bantuan sosial, serta artikel dan publikasi yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat hasil

wawancara dan observasi serta memberikan dasar kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dilakukan secara bersamaan dan saling melengkapi untuk menghasilkan data yang komprehensif dan mendalam. Wawancara memberikan data mengenai pandangan dan pengalaman informan, observasi memberikan data empiris mengenai situasi nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi memberikan data pendukung yang bersifat objektif. Dengan kombinasi ketiganya, peneliti diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang utuh tentang pelaksanaan, kendala, serta dampak dari program bantuan sosial dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada tahun 2024.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif karena pada tahap ini peneliti menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan dilakukan secara terus menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami pola, hubungan, serta makna yang muncul dari data lapangan secara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018), yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

(*conclusion drawing and verification*). Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan dan saling berhubungan selama proses penelitian.

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan program bantuan sosial dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Genuk. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang penting dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti efektivitas pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Melalui proses reduksi ini, peneliti berupaya menata data agar lebih terstruktur dan mudah untuk dianalisis secara mendalam.

2. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*). Setelah data direduksi, peneliti menyusun data ke dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis agar hubungan antar kategori dapat terlihat dengan jelas. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menjelaskan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, serta didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk memperkuat keabsahan temuan. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat memahami bagaimana implementasi program bantuan sosial berlangsung di lapangan, siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan *member check* kepada informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan kenyataan di lapangan. Proses ini penting untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data.

Ketiga tahapan analisis tersebut, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara interaktif dan berulang hingga peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Melalui teknik analisis ini, peneliti berupaya menggambarkan secara mendalam bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya, serta sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tahun 2024.

1.9.7 Teknik Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Data yang

diperoleh harus mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan uji keabsahan data agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga memiliki tingkat kredibilitas (*credibility*) yang tinggi. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan dan tidak mengalami penyimpangan selama proses penelitian berlangsung.

Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan berbagai sumber data untuk membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Menurut Denzin, (1978), triangulasi digunakan sebagai teknik untuk membandingkan data dari berbagai sumber guna melihat konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh. Sejalan dengan hal tersebut, Sugiyono, (2019) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber data yang telah ada sehingga dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Dengan adanya triangulasi, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi saja.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari beberapa sumber atau informan penelitian yang berbeda. Kota Semarang yang melibatkan banyak pihak

dengan peran, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Permasalahan mengenai bantuan sosial pascabencana tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja, karena setiap pihak memiliki pengalaman dan penilaian yang berbeda terkait pelaksanaan program bantuan sosial tersebut.

Penelitian ini melibatkan beberapa sumber data, yaitu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang, aparat wilayah setempat, serta masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Genuk. Masing-masing sumber memiliki informasi yang berbeda sesuai dengan tugas, fungsi, dan pengalaman yang dimiliki dalam proses pelaksanaan bantuan sosial pascabencana banjir. Pihak BPBD dan Dinas Sosial memberikan informasi terkait kebijakan, mekanisme penyaluran bantuan, proses pendataan korban, hingga bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak banjir. Sementara itu, aparat wilayah memberikan informasi mengenai kondisi masyarakat di lapangan serta proses distribusi bantuan di tingkat lokal. Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung yang mereka rasakan terkait ketepatan bantuan, manfaat bantuan, serta kendala yang mereka hadapi selama proses penerimaan bantuan sosial.

Penggunaan triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara antar informan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh. Peneliti tidak hanya menerima informasi dari satu pihak, tetapi juga melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut kepada sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai contoh, informasi mengenai ketepatan penyaluran bantuan yang disampaikan oleh instansi pelaksana

dibandingkan kembali dengan informasi dari masyarakat penerima bantuan. Begitu pula informasi mengenai kendala penyaluran bantuan dibandingkan antara pihak pelaksana program dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah informasi yang diperoleh memiliki kesamaan, perbedaan, maupun ketidaksesuaian sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh data yang lebih objektif.

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber adalah karena teknik ini dinilai paling sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada evaluasi program bantuan sosial pascabencana. Penelitian mengenai evaluasi kebijakan atau program publik membutuhkan data dari berbagai pihak agar hasil penelitian tidak hanya berfokus pada sudut pandang pelaksana program, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman dan penilaian masyarakat sebagai penerima manfaat program. Jika peneliti hanya menggunakan satu sumber data, maka terdapat kemungkinan munculnya bias subjektivitas yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Oleh sebab itu, triangulasi sumber digunakan untuk memperkuat kepercayaan terhadap data yang diperoleh melalui proses perbandingan antar sumber informasi.

Selain itu, penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan program bantuan sosial pascabencana banjir di Kecamatan Genuk. Melalui berbagai sumber data yang berbeda, peneliti dapat memahami bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan, sejauh mana bantuan tersebut mampu membantu proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, serta berbagai hambatan yang terjadi selama

proses penyaluran bantuan berlangsung. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi secara administratif, tetapi juga menunjukkan kondisi empiris yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, peneliti berharap hasil penelitian dapat memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi, mengurangi kemungkinan terjadinya bias data, serta menghasilkan temuan penelitian yang lebih objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, triangulasi sumber menjadi teknik yang penting dalam penelitian ini untuk memperkuat validitas data terkait evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang.